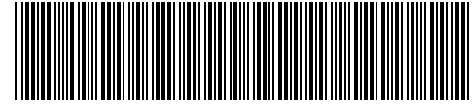




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.408767/2024**



DS:3901-7188-7081-4584

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408767) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 24.309.160.000 ( DUA PULUH EMPAT MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN JUTA SERATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.WA Program Dukungan Manajemen

013.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

	Jumlah Uang
Rp.	24.309.160.000
Rp.	24.309.160.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	24.309.160.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 24.309.160.000

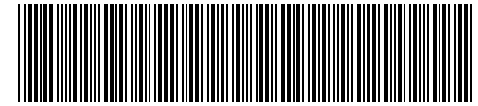
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408767/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



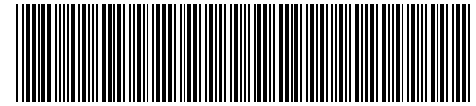
DS:3901-7188-7081-4584

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408767) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.01.WA	Program Dukungan Manajemen			24.309.160.000
Kegiatan	:	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			24.309.160.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	20.170.975.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	78.496.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	569.608.000
		03	EBA.959 Layanan Protokoler	1,00	Layanan	115.526.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	107.232.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	81.772.000
		06	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	19.218.341.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	202,00	Unit, m2, Paket	804.125.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	202,00	Unit	804.125.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	308.826.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,00	Layanan	308.826.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.025.234.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	1.029.725.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	923.144.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	620.607.000
		04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Dokumen	425.403.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408767/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3901-7188-7081-4584

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408767) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 2

---

		Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
05	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.00	Dokumen		26.355.000

---

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

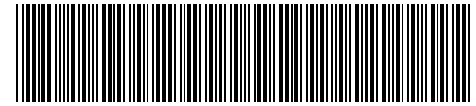
ttd.  
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.01.2.408767/2024

I B. SUMBER DANA



DS:3901-7188-7081-4584

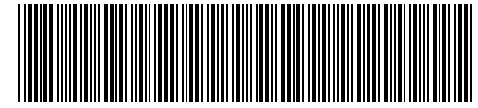
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408767) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	24.309.160.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	24.309.160.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408767/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



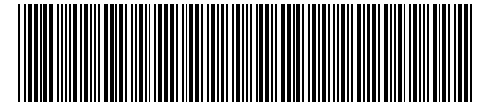
DS:3901-7188-7081-4584

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408767) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408767	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	13.466.475	10.118.560	724.125	-	-	24.309.160		
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.466.475	10.118.560	724.125	-	-	24.309.160		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	13.466.475	10.118.560	724.125	-	-	24.309.160		
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	13.466.475	6.704.500	-	-	-	20.170.975	07 . 51	
01 RM		13.466.475	6.704.500	-	-	-	20.170.975	004	
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	80.000	724.125	-	-	804.125	07 . 51	
01 RM		-	80.000	724.125	-	-	804.125	004	
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	308.826	-	-	-	308.826	07 . 51	
01 RM		-	308.826	-	-	-	308.826	004	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408767/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3901-7188-7081-4584

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408767) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	3.025.234	-	-	-	3.025.234	07 . 51	
01	RM	-	3.025.234	-	-	-	3.025.234	004	
<b>JUMLAH</b>		<b>13.466.475</b>	<b>10.118.560</b>	<b>724.125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.309.160</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408767/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3901-7188-7081-4584

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408767) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408767	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.657.192	2.157.174	1.984.254	2.859.990	1.969.442	1.982.865	2.202.153	1.997.796	1.847.280	1.968.220	1.873.115	1.809.681	24.309.160
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.341	13.466.475
		<b>BELANJA BARANG</b>	534.998	1.034.980	862.060	1.013.671	847.248	860.671	1.079.959	875.602	725.086	846.026	750.921	687.340	10.118.560
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	0	0	724.125	0	0	0	0	0	0	0	0	724.125
	013.01.WA.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.657.192	2.157.174	1.984.254	2.859.990	1.969.442	1.982.865	2.202.153	1.997.796	1.847.280	1.968.220	1.873.115	1.809.681	24.309.160
		51 BELANJA PEGAWAI	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.194	1.122.341	13.466.475
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	534.998	1.034.980	862.060	1.013.671	847.248	860.671	1.079.959	875.602	725.086	846.026	750.921	687.340	10.118.560
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	724.125	0	0	0	0	0	0	0	0	724.125

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408767/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:3901-7188-7081-4584

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408767] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

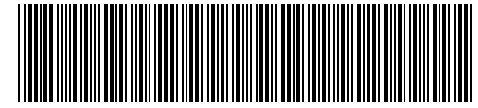
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.  
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408767/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:3901-7188-7081-4584

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408767] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

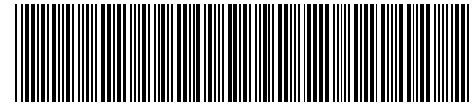
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.  
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408762/2024**



DS:5103-1090-1073-4563

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408762) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 4.457.249.000 ( EMPAT MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	4.457.249.000
Rp.	4.457.249.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	4.457.249.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 4.457.249.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408762/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5103-1090-1073-4563

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408762) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	: 013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4.457.249.000
Kegiatan	: 5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			4.457.249.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
	: 2. 01	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
	: 3. 01	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	2.914.578.000
Rincian Output	: 01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	2.914.578.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara, Berkas Perkara	23.080.000
Rincian Output	: 01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara	23.080.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.519.591.000
Rincian Output	: 01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	13,00	Lembaga	1.519.591.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

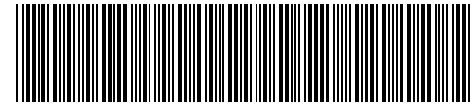
ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.03.2.408762/2024

I B. SUMBER DANA



DS:5103-1090-1073-4563

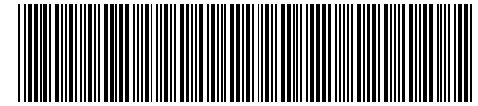
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408762) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	4.457.249.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	4.457.249.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408762/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5103-1090-1073-4563

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408762) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

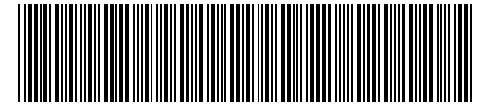
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408762	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	-	4.457.249	-	-	-	4.457.249		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	4.457.249	-	-	-	4.457.249		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	4.457.249	-	-	-	4.457.249		
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	2.914.578	-	-	-	2.914.578	07 . 51	
04	PNBP	-	2.914.578	-	-	-	2.914.578	004	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	23.080	-	-	-	23.080	07 . 51	
04	PNBP	-	23.080	-	-	-	23.080	004	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	1.519.591	-	-	-	1.519.591	07 . 51	
04	PNBP	-	1.519.591	-	-	-	1.519.591	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>4.457.249</b>	-	-	-	<b>4.457.249</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408762/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5103-1090-1073-4563

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408762) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408762	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	122.365	527.132	500.345	549.781	540.078	430.731	671.926	461.875	375.366	277.650	0	4.457.249
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	122.365	527.132	500.345	549.781	540.078	430.731	671.926	461.875	375.366	277.650	0	4.457.249
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	122.365	527.132	500.345	549.781	540.078	430.731	671.926	461.875	375.366	277.650	0	4.457.249
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	122.365	527.132	500.345	549.781	540.078	430.731	671.926	461.875	375.366	277.650	0	4.457.249

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408762/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:5103-1090-1073-4563

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408762] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408762/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:5103-1090-1073-4563

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408762] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

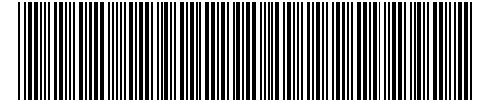
Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408763/2024**



DS:0434-1408-3947-0110

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408763) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 2.439.470.000 ( DUA MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	2.439.470.000
Rp.	2.439.470.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.439.470.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 2.439.470.000

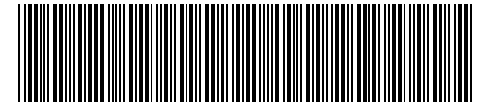
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408763/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



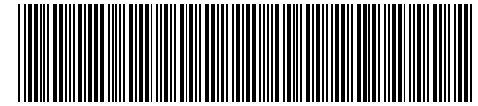
DS:0434-1408-3947-0110

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408763) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.439.470.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	2.439.470.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408763/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0434-1408-3947-0110

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408763) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 22. 04 Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/harapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/harapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	168,00	orang	489.084.000
Rincian Output		:	01	AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	168,00	orang	489.084.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	42,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.818.386.000
Rincian Output		:	01	BDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasarakatan	42,00	Unit Kerja	1.818.386.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	132.000.000
Rincian Output		:	01	BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12,00	operasi	132.000.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

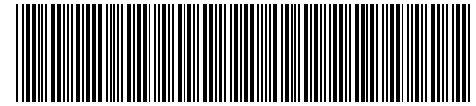
ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.05.2.408763/2024

I B. SUMBER DANA



DS:0434-1408-3947-0110

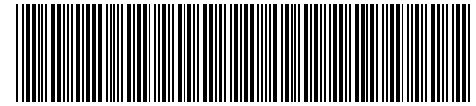
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408763) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	2.439.470.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.439.470.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408763/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0434-1408-3947-0110

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408763) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408763	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	-	2.439.470	-	-	-	2.439.470		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.439.470	-	-	-	2.439.470		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	2.439.470	-	-	-	2.439.470		
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	489.084	-	-	-	489.084	07 . 51	
01	RM	-	489.084	-	-	-	489.084	004	
5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	1.818.386	-	-	-	1.818.386	07 . 51	
01	RM	-	1.818.386	-	-	-	1.818.386	004	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	132.000	-	-	-	132.000	07 . 51	
01	RM	-	132.000	-	-	-	132.000	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2.439.470</b>	-	-	-	<b>2.439.470</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408763/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0434-1408-3947-0110

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408763) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408763	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	27.868	151.354	179.608	486.354	372.804	175.718	515.772	298.496	27.868	114.542	66.386	22.700	2.439.470
		<b>BELANJA BARANG</b>	27.868	151.354	179.608	486.354	372.804	175.718	515.772	298.496	27.868	114.542	66.386	22.700	2.439.470
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	27.868	151.354	179.608	486.354	372.804	175.718	515.772	298.496	27.868	114.542	66.386	22.700	2.439.470
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	27.868	151.354	179.608	486.354	372.804	175.718	515.772	298.496	27.868	114.542	66.386	22.700	2.439.470

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408763/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:0434-1408-3947-0110

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408763] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408763/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:0434-1408-3947-0110

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408763] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

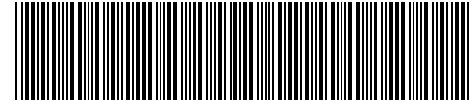
Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.408764/2024**



DS:5624-3338-3455-6232

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408764) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 3.089.927.000 ( TIGA MILIAR DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.06.BF.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	3.089.927.000
Rp.	3.089.927.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	3.089.927.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 3.089.927.000

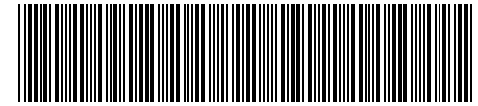
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408764/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5624-3338-3455-6232

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408764) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3.089.927.000
Kegiatan	:	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			3.089.927.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani			
		2. 01	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima			
		3. 02	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	37,00	operasi, Hari Operasi	812.683.000
Rincian Output	:	01	BHB.U01 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	24.00	operasi	341.736.000
		02	BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah	8.00	operasi	174.752.000
		03	BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah	4.00	operasi	225.380.000
		04	BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1.00	operasi	70.815.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	26,00	Orang, Laporan	2.007.404.000
Rincian Output	:	01	BIB.004 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	26.00	Laporan	2.007.404.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	6,00	laporan	269.840.000
Rincian Output	:	01	BKA.001 Pengawasan Orang Asing	6.00	laporan	269.840.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

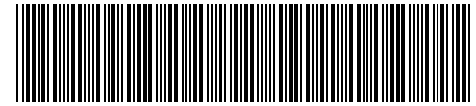
ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.06.2.408764/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:5624-3338-3455-6232

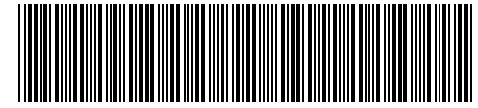
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408764) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	3.089.927.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	3.089.927.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408764/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5624-3338-3455-6232

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408764) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

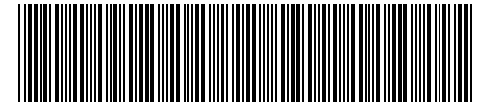
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408764	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	-	3.089.927	-	-	-	3.089.927		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.089.927	-	-	-	3.089.927		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	3.089.927	-	-	-	3.089.927		
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	812.683	-	-	-	812.683	07.51	
04	PNBP	-	812.683	-	-	-	812.683	004	
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	2.007.404	-	-	-	2.007.404	07.51	
04	PNBP	-	2.007.404	-	-	-	2.007.404	004	
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	269.840	-	-	-	269.840	07.51	
04	PNBP	-	269.840	-	-	-	269.840	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>3.089.927</b>	-	-	-	<b>3.089.927</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408764/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5624-3338-3455-6232

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408764) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

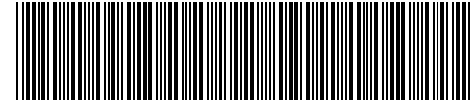
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408764	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	28.478	363.046	328.803	221.240	264.928	348.400	221.240	264.928	277.585	221.240	272.458	277.581	3.089.927
		<b>BELANJA BARANG</b>	28.478	363.046	328.803	221.240	264.928	348.400	221.240	264.928	277.585	221.240	272.458	277.581	3.089.927
	013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	28.478	363.046	328.803	221.240	264.928	348.400	221.240	264.928	277.585	221.240	272.458	277.581	3.089.927
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	28.478	363.046	328.803	221.240	264.928	348.400	221.240	264.928	277.585	221.240	272.458	277.581	3.089.927

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408764/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:5624-3338-3455-6232

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408764] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

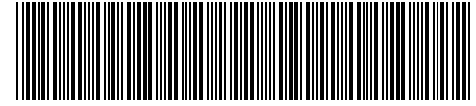
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408764/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:5624-3338-3455-6232

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408764] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.408765/2024**



DS:9610-0360-9276-2003

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408765) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 2.401.219.000 ( DUA MILIAR EMPAT RATUS SATU JUTA DUA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.07.BF.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	2.401.219.000
Rp.	2.401.219.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.401.219.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 2.401.219.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408765/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9610-0360-9276-2003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408765) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.401.219.000
Kegiatan	:	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.401.219.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Penegakan hukum KI di Wilayah			
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah			
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	600,00	Orang	2.186.816.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	300,00	Orang	1.225.968.000
		02 BDC.002	Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	150,00	Orang	87.893.000
		03 BDC.003	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	150,00	Orang	872.955.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5253.BKB	Pemantauan produk	3,00	laporan	214.403.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,00	laporan	214.403.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

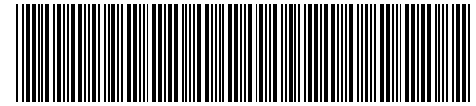
ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.07.2.408765/2024**

**I B. SUMBER DANA**



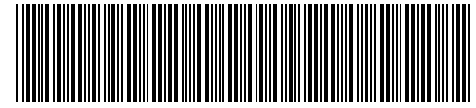
DS:9610-0360-9276-2003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408765) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

		Rp.	2.401.219.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2024					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			2.401.219.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408765/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9610-0360-9276-2003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408765) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

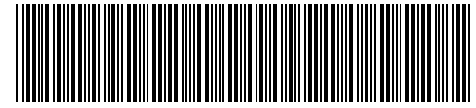
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408765	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	-	2.401.219	-	-	-	2.401.219		
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.401.219	-	-	-	2.401.219		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.401.219	-	-	-	2.401.219		
5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	2.186.816	-	-	-	2.186.816	07 . 51	
04	PNBP	-	2.186.816	-	-	-	2.186.816	004	
5253.BKB	Pemantauan produk (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	214.403	-	-	-	214.403	07 . 51	
04	PNBP	-	214.403	-	-	-	214.403	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2.401.219</b>	-	-	-	<b>2.401.219</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408765/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9610-0360-9276-2003

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408765) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

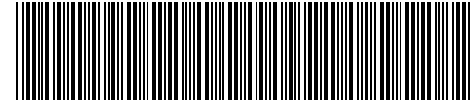
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408765	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	81.107	244.312	291.326	456.946	147.777	130.062	425.255	90.106	96.247	217.195	220.885	2.401.219
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	81.107	244.312	291.326	456.946	147.777	130.062	425.255	90.106	96.247	217.195	220.885	2.401.219
	013.07.BF.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	81.107	244.312	291.326	456.946	147.777	130.062	425.255	90.106	96.247	217.195	220.885	2.401.219
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	81.107	244.312	291.326	456.946	147.777	130.062	425.255	90.106	96.247	217.195	220.885	2.401.219

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408765/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:9610-0360-9276-2003

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408765] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

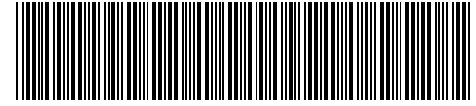
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408765/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:9610-0360-9276-2003

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408765] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

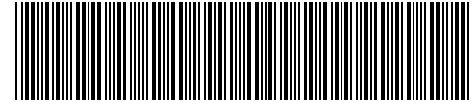
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408766/2024**



DS:9033-0685-6809-1650

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408766) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 450.000.000 ( EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi

013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 450.000.000

Rp. 450.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	450.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 450.000.000

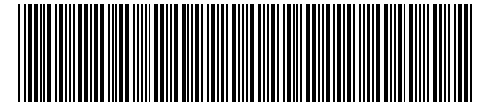
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9033-0685-6809-1650

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408766) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi				450.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				450.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan				
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	34,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian		305.979.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	34,00	Rekomendasi Kebijakan		305.979.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	30,00	Orang		144.021.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	30,00	Orang		144.021.000

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

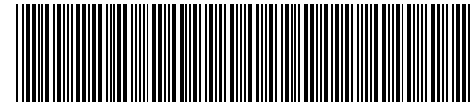


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2024

I B. SUMBER DANA



DS:9033-0685-6809-1650

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408766) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	450.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	450.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9033-0685-6809-1650

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408766) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408766	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	-	450.000	-	-	-	450.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	450.000	-	-	-	450.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	450.000	-	-	-	450.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	305.979	-	-	-	305.979	07 . 51	
01	RM	-	305.979	-	-	-	305.979	004	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	144.021	-	-	-	144.021	07 . 51	
01	RM	-	144.021	-	-	-	144.021	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>450.000</b>	-	-	-	<b>450.000</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9033-0685-6809-1650

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408766) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408766	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	31.765	31.765	64.559	44.363	31.765	31.765	31.765	31.765	32.406	37.880	40.319	39.883	450.000
		<b>BELANJA BARANG</b>	31.765	31.765	64.559	44.363	31.765	31.765	31.765	31.765	32.406	37.880	40.319	39.883	450.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	31.765	31.765	64.559	44.363	31.765	31.765	31.765	31.765	32.406	37.880	40.319	39.883	450.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	31.765	31.765	64.559	44.363	31.765	31.765	31.765	31.765	32.406	37.880	40.319	39.883	450.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:9033-0685-6809-1650

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408766] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:9033-0685-6809-1650

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408766] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408768/2024**



DS:0368-6447-0143-0690

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408768) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 356.280.000 ( TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM  
013.09.BG. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

		Jumlah Uang
Rp.	356.280.000	
Rp.	356.280.000	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	356.280.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 356.280.000

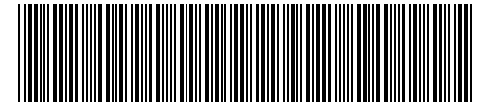
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408768/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0368-6447-0143-0690

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408768) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	: 013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			356.280.000
Kegiatan	: 5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			356.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	: 2. 01	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
	: 3. 02	Jumlah kab/kota peduli HAM			
	: 4. 03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	61.960.000
Rincian Output	: 01 BAH.001	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	3,00	layanan	61.960.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	32.405.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1,00	Lembaga	32.405.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	11,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	261.915.000
Rincian Output	: 01 FBA.001	Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	140.520.000
	: 02 FBA.002	Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	54.435.000
	: 03 FBA.003	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah	4,00	Kab/Kota	29.140.000
	: 04 FBA.004	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	37.820.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.09.2.408768/2024

I B. SUMBER DANA



DS:0368-6447-0143-0690

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408768) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	356.280.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	356.280.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408768/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0368-6447-0143-0690

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408768) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408768	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	-	356.280	-	-	-	356.280		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	356.280	-	-	-	356.280		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	356.280	-	-	-	356.280		
5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	61.960	-	-	-	61.960	07 . 51	
01	RM	-	61.960	-	-	-	61.960	004	
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	32.405	-	-	-	32.405	07 . 51	
01	RM	-	32.405	-	-	-	32.405	004	
5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	261.915	-	-	-	261.915	07 . 51	
01	RM	-	261.915	-	-	-	261.915	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>356.280</b>	-	-	-	<b>356.280</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408768/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0368-6447-0143-0690

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408768) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408768	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	30.592	356.280
		<b>BELANJA BARANG</b>	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	30.592	356.280
	013.09.BG.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	30.592	356.280
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	29.608	30.592	356.280

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408768/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:0368-6447-0143-0690

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408768] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

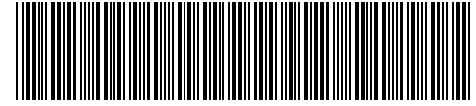
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408768/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:0368-6447-0143-0690

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408768] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

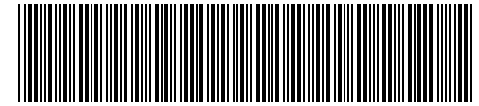
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408769/2024**



DS:2019-4791-0219-0043

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 4.013.953.000 ( EMPAT MILIAR TIGA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	4.013.953.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBPN TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 4.013.953.000

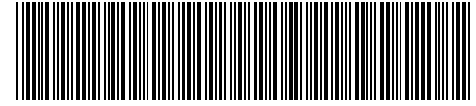
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024**



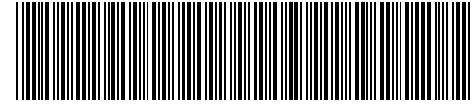
DS:2019-4791-0219-0043

Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

---

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	141.516.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	141.516.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.872.437.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	3.872.437.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi		141.516.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		141.516.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan		
		2. 02	Jumlah fasilitas Perencanaan Perda		
Klasifikasi Rincian Output	1 :	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian 57.005.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan 57.005.000
Klasifikasi Rincian Output	2 :	5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim 84.511.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitas Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga 84.511.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		3.872.437.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		3.872.437.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah		
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum litigasi		
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap dari usulan kantor wilayah		
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum non-litigasi		
Klasifikasi Rincian Output	1 :	4841.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	10,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi 99.997.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	10,00	Lembaga 99.997.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		17,00	Kelompok Masyarakat	152.000.000
Rincian Output		:	01	BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	86.999.000
		:	02	BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	65.001.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		37,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	53.921.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	37,00	Lembaga	53.921.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		37,00	Lembaga, Unit Kerja	89.019.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	37,00	Lembaga	89.019.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		368,00	Orang	2.944.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	368,00	Orang	2.944.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		50,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	533.500.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	50,00	Kegiatan	533.500.000

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

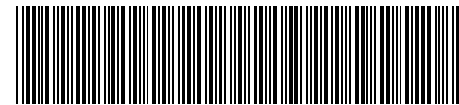


**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	4.013.953.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	4.013.953.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408769	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	-	3.996.764	17.189	-	-	4.013.953		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	141.516	-	-	-	141.516		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	141.516	-	-	-	141.516		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	57.005	-	-	-	57.005	07 . 51	
01	RM	-	57.005	-	-	-	57.005	004	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	84.511	-	-	-	84.511	07 . 51	
01	RM	-	84.511	-	-	-	84.511	004	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.855.248	17.189	-	-	3.872.437		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	3.855.248	17.189	-	-	3.872.437		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	82.808	17.189	-	-	99.997	07 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



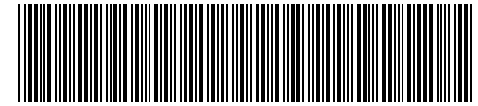
DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	82.808	17.189	-	-	99.997	004	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	152.000	-	-	-	152.000	07 . 51	
01 RM		-	152.000	-	-	-	152.000	004	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	53.921	-	-	-	53.921	07 . 51	
01 RM		-	53.921	-	-	-	53.921	004	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	89.019	-	-	-	89.019	07 . 51	
01 RM		-	89.019	-	-	-	89.019	004	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	2.944.000	-	-	-	2.944.000	07 . 51	
01 RM		-	2.944.000	-	-	-	2.944.000	004	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	533.500	-	-	-	533.500	07.51	
01	RM	-	533.500	-	-	-	533.500	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>3.996.764</b>	<b>17.189</b>	-	-	<b>4.013.953</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408769) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

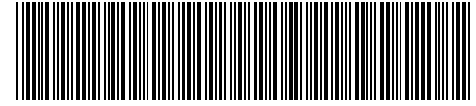
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408769	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	432.192	457.441	371.955	397.518	394.989	435.112	406.185	392.588	386.463	339.510	0	4.013.953
		BELANJA BARANG	0	432.192	457.441	369.359	397.356	393.897	424.118	405.578	391.941	385.371	339.510	0	3.996.764
		BELANJA MODAL	0	0	0	2.596	162	1.092	10.994	607	647	1.092	0	0	17.189
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	21.296	14.050	18.820	11.500	21.040	15.030	14.280	14.440	4.900	6.160	0	141.516
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	21.296	14.050	18.820	11.500	21.040	15.030	14.280	14.440	4.900	6.160	0	141.516
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	410.896	443.391	353.135	386.018	373.949	420.082	391.905	378.148	381.563	333.350	0	3.872.437
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	410.896	443.391	350.539	385.856	372.857	409.088	391.298	377.501	380.471	333.350	0	3.855.248
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	2.596	162	1.092	10.994	607	647	1.092	0	0	17.189

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408769] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

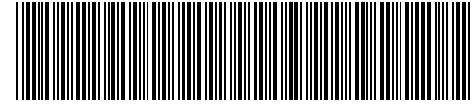
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408769/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:2019-4791-0219-0043

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408769] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

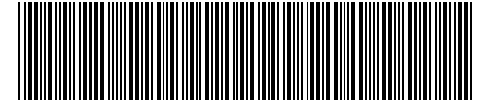
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.408770/2024**



DS:2730-5142-9876-6001

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
  3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (408770) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
- Sebesar : Rp. 364.640.000 ( TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen

013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

		Jumlah Uang
	Rp.	364.640.000
	Rp.	364.640.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	364.640.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I (004) Rp. 364.640.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408770/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2730-5142-9876-6001

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408770) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			364.640.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			364.640.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	364.640.000
Rincian Output	:	01	ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	4,00	Rekomendasi Kebijakan	335.050.000
	:	02	ABD.002 Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	29.590.000

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.11.2.408770/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:2730-5142-9876-6001

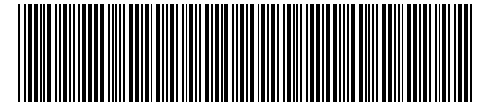
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
 Kode>Nama Satker : (408770) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	364.640.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	364.640.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408770/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2730-5142-9876-6001

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408770) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408770	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	-	364.640	-	-	-	364.640		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	364.640	-	-	-	364.640		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	364.640	-	-	-	364.640		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	364.640	-	-	-	364.640	07.51	
01	RM	-	364.640	-	-	-	364.640	004	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>364.640</b>	-	-	-	<b>364.640</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408770/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2730-5142-9876-6001

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA  
Kode>Nama Satker : (408770) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	408770	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA														
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.526	364.640
		<b>BELANJA BARANG</b>	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.526	364.640
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.526	364.640
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.374	30.526	364.640

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408770/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:2730-5142-9876-6001

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408770] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408770/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:2730-5142-9876-6001

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA  
Kode dan Nama Satker : [408770] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002